

Nomor : 034400.S/KU.02.00/COS/2024
Sifat :
Perihal : Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Lanjutan atas Laporan Keuangan
Tahunan Auditan per 31 Desember 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas

Jakarta, 8 Mei 2024

Yang Terhormat,
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Menindaklanjuti surat dari Bursa Efek Indonesia ("BEI") No.: S-04277/BEI.PP2/05-2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Permintaan Penjelasan Lanjutan atas Laporan Keuangan Tahunan Auditan per 31 Desember 2023, yang kami terima pada Sistem Pelaporan Elektronik Terintegrasi Bursa ("SPE-IDXnet") pada tanggal 6 Mei 2024, bersama ini kami sampaikan penjelasan Perseroan atas pertanyaan Bursa sebagaimana terlampir (Lampiran 1).

Sebagai informasi, terdapat tanggapan Perseroan atas pertanyaan Bursa yang tidak dipublikasikan (Lampiran II) sehingga tanggapan atas pertanyaan tersebut disampaikan melalui SPE-IDXnet form E074 Korespondensi oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa (*non publish*).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary



Rachmat Utama

Tembusan:

1. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, Otoritas Jasa Keuangan.

Lampiran I Penjelasan Perseroan
Permintaan Penjelasan Lanjutan atas Laporan Keuangan Tahunan Auditan
per 31 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban																
1	<p>Berdasarkan tanggapan Perseroan nomor 3 terkait dengan Piutang Usaha, Perseroan menyampaikan status pelunasan piutang usaha Perseroan per 31 Desember 2023 sampai dengan 22 Maret 2024, di mana masih terdapat <i>outstanding</i> piutang usaha sebesar USD 299,5 juta (46%) dan sebagian besar berasal dari piutang usaha yang sudah jatuh tempo lebih dari 1 tahun yaitu sebesar USD 213 juta. Agar Perseroan dapat menjelaskan:</p> <p>a. Latar belakang piutang usaha >1 tahun sebesar USD 213 juta masih <i>outstanding</i> sampai dengan 22 Maret 2024? Agar dapat dijelaskan beserta dengan upaya Perseroan untuk memperoleh pelunasan.</p> <p>b. Perincian piutang usaha >1 tahun tersebut dengan melengkapi tabel berikut ini:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Nama pihak</th> <th style="text-align: center;">Piutang >1 tahun per 31 Des 2023</th> <th style="text-align: center;">Jumlah yang sudah dicadangkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: center;">USD 213.711.239</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama pihak	Piutang >1 tahun per 31 Des 2023	Jumlah yang sudah dicadangkan									Total		USD 213.711.239		<p>Penjelasan Perseroan untuk pertanyaan Nomor 1 poin a dan b merupakan informasi yang tidak dipublikasikan, sehingga Perseroan akan menyampaikan tanggapan kepada Bursa melalui SPE-IDXnet form E074 Korespondensi oleh Perusahaan Terdaftar kepada Bursa (<i>non publish</i>).</p>
No	Nama pihak	Piutang >1 tahun per 31 Des 2023	Jumlah yang sudah dicadangkan															
Total		USD 213.711.239																
2	<p>Berdasarkan tanggapan Perseroan nomor 4 terkait dengan piutang lain-lain, agar Perseroan dapat menjelaskan lebih lanjut:</p> <p>a. Estimasi realisasi uang muka pembelian LNG dari Pertamina sebesar USD 7,8 juta.</p> <p>b. Sehubungan dengan pinjaman SHL PDG sebesar USD 4,2 juta, Perseroan menjelaskan bahwa piutang pinjaman tersebut akan dilunasi pada Juni 2024 sebesar USD 2,1 juta dan pada 1 Desember 2024 sebesar USD 2,1 juta. Agar dapat dijelaskan:</p> <p>i. <i>Nature</i> dari piutang pinjaman Perseroan kepada SHL PDG sebesar USD 4,2 juta.</p>	<p>a. Uang Muka Pembelian LNG Uang muka pembelian LNG dari Pertamina, telah di settle melalui pengembalian uang muka dari Pertamina.</p> <p>b. Piutang Shareholder Loan i. <i>Nature</i> dari Piutang Pinjaman Perseroan berupa SHL kepada PDG adalah pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham (PT Pertamina Gas) kepada Perusahaan berupa sejumlah dana untuk pembiayaan suatu proyek investasi tertentu. Shareholder loan berfungsi sebagai instrumen pendanaan yang fleksibel. Dengan shareholder loan, pemegang saham bisa memberikan dana tambahan kepada perusahaan tanpa harus mengubah struktur kepemilikan saham.</p>																

Paraf:.....

Lampiran I Penjelasan Perseroan
Permintaan Penjelasan Lanjutan atas Laporan Keuangan Tahunan Auditan
per 31 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
	<p>ii. Apakah terdapat pengenaan bunga atas piutang pinjaman Perseroan kepada SHL PDG? Jika iya, agar dijabarkan jumlah pendapatan bunga yang sudah diakui.</p>	<p>ii. Atas SHL tersebut, terdapat pengenaan bunga dengan besaran yang disepakati dalam Perjanjian. Jumlah pendapatan bunga atas SHL tersebut yang telah diakui Perseroan adalah 6,5% dari nilai pokok pinjaman sesuai dengan periode jatuh temponya.</p>
3	<p>Berdasarkan tanggapan Perseroan nomor 7 terkait dengan Penyertaan Saham dan Ventura Bersama, Perseroan menjelaskan bahwa alasan Perseroan tidak mengkonsolidasi beberapa entitas ventura bersama meskipun kepemilikan Perseroan sudah di atas 50% adalah sesuai dengan anggaran dasar pendirian masing-masing ventura bersama, bentuk pengendalian yang ditentukan adalah pengendalian bersama. Agar Perseroan dapat menjelaskan:</p> <p>a. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Perseroan dan counterparty Perseroan pada masing-masing ventura bersama? Agar dijelaskan.</p>	<p>a. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Perseroan pada ventura bersama mengikuti ketentuan sesuai Anggaran Dasar dan Perjanjian Pemegang Saham yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Transportasi Gas Indonesia</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesuai AD pasal 15 ayat 8 maka pengambilan keputusan Pemegang Saham bersifat supermajority di mana keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan sah dalam RUPS. 2. Sesuai Pasal 17 ayat 3 huruf d, suara setuju Pemegang Saham Perseroan yang secara keseluruhan mewakili tidak kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari jumlah saham Perseroan diperlukan untuk...dst" 2. <u>Perta Daya Gas</u>: sesuai dengan AD pasal 10 ayat (1), RUPS harus dihadiri dan disetujui oleh lebih dari 3/4 hak suara untuk pengesahan laporan tahunan dan penunjukan KAP, sedangkan untuk tindakan Direksi lainnya harus dihadiri dan disetujui oleh 100% (unanimous) Pemegang Saham. 3. <u>Perta Samtan Gas</u>: sesuai dengan AD pasal 22 ayat (1), RUPS dapat mengambil keputusan jika Pemegang Saham hadir mewakili dan menyetujui lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. 4. <u>Perkasa</u>: sesuai dengan AD pasal 11 ayat (1) huruf a,b,e, ayat (2) huruf a,b,c, ayat (3) huruf a,b,c, RUPS dapat dilangsungkan dan keputusan RUPS sah jika RUPS dihadiri dan disetujui oleh 100% Pemegang Saham. 5. <u>JUP</u>: Kerja sama antara Gagah - JUP merupakan perjanjian <i>joint operation</i> sehingga tidak mempunyai proses pengambilan keputusan seperti RUPS. <p>Perseroan mengakui keberadaan hak keikutsertaan yang substantif dari pemegang saham lain Transgasindo, Perkasa, PSG, PDG dan JUP yang menyebabkan pemegang saham lain tersebut memiliki hak yang setara dengan Perseroan dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasional yang penting. Dengan pertimbangan hak yang dimiliki pemegang saham lainnya, Perseroan tidak memiliki <i>single majority approval</i> atas kebijakan keuangan dan operasional yang penting meskipun Perseroan memiliki kepemilikan saham lebih dari 50%.</p>

Paraf: 

Lampiran I Penjelasan Perseroan
Permintaan Penjelasan Lanjutan atas Laporan Keuangan Tahunan Auditan
per 31 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
	<p>b. Apakah Perseroan dan counterparty memiliki keterwakilan direksi/komisaris di masing-masing ventura bersama? Agar dapat dijelaskan.</p>	<p>b. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Perjanjian Pemegang Saham Perseroan, keterwakilan Direksi/Komisaris di masing-masing ventura bersama adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Transportasi Gas Indonesia</u> <ol style="list-style-type: none"> i. Pasal 16 ayat 2 “Para Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Dengan ketentuan bahwa selama Transasia memiliki sedikitnya 35% (tiga puluh lima persen) dari saham Perseroan maka Transasia berhak untuk mencalonkan 2 (dua) Direktur yaitu Direktur Operasi dan Direktur Pengembangan Usaha dan apabila Transasia memiliki sedikitnya 25% (dua puluh lima persen) dari saham perseroan tetapi kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dari saham Perseroan maka Transasia hanya berhak mencalonkan 1 (satu) Direktur yaitu Direktur Operasi. Seluruh anggota Direksi Perseroan selain dari yang dicalonkan oleh Transasia sebagaimana disebutkan diatas akan dicalonkan oleh PGN. ii. Pasal 19 ayat 2 “Para Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Dengan ketentuan bahwa selama Transasia memiliki sedikitnya 35% (tiga puluh lima persen) dari saham Perseroan maka Transasia berhak untuk mencalonkan 2 (dua) Dewan Komisaris, salah satunya Wakil Komisaris Utama dan apabila Transasia memiliki sedikitnya 25% (dua puluh lima persen) dari saham perseroan tetapi kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dari saham Perseroan maka Transasia hanya berhak mencalonkan 1 (satu) anggota dewan Komisaris yaitu Wakil Komisaris Utama. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan selain dari yang dicalonkan oleh Transasia sebagaimana disebutkan diatas maka akan dicalonkan oleh PGN. 2. <u>Perta Daya Gas</u> <ol style="list-style-type: none"> i. Pasal 11 ayat 3 “Direksi Perseroan dipilih dan diangkat dari calon yang diusulkan oleh para pemegang saham dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama dipilih dari calon yang diusulkan PT. Pertamina Gas 2. Direktur Keuangan dipilih dari calon yang diusulkan PT. Indonesia Power 3. Direktur Operasi dipilih dari calon yang diusulkan PT. Pertamina Gas ii. Pasal 14 Ayat 8 “Dewan Komisaris akan mengawasi pengelolaan Perseroan oleh Direksi, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama diangkat dari calon yang diajukan oleh PT. Indonesia Power 2. Seorang Komisaris akan diangkat dari calon yang diajukan oleh PT. Pertamina Gas 3. Penetapan calon anggota Dewan Komisaris tersebut di atas adalah wewenang masing-masing pemegang saham, dan harus diterima oleh para pemegang saham dalam RUPS

Paraf: 


Lampiran I Penjelasan Perseroan
Permintaan Penjelasan Lanjutan atas Laporan Keuangan Tahunan Auditan
per 31 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
	<p>c. Perseroan menjelaskan bahwa “Pencatatan untuk Transgasindo, Perkasa, PDG dan PSG tidak memenuhi kriteria pengendalian sesuai PSAK 110 (d.h PSAK 65) sehingga laporan keuangan tidak dikonsolidasi namun mengacu pada PSAK 111 Pengaturan Bersama (d.h PSAK 66) dengan menggunakan equity method. Agar Perseroan dapat menjelaskan:</p> <p>i. Indikator-indikator yang menunjukkan bahwa Perseroan tidak memiliki pengendalian pada Transgasindo, Perkasa, PDG, PSG dan JUP.</p>	<p>pengangkatan anggota Dewan Komisaris, kecuali dapat dibuktikan bahwa calon tersebut tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku”</p> <p>Ketentuan tersebut di atas berlaku untuk pengangkatan anggota Direksi Perseroan pertama kali pada saat pendirian perusahaan, sedangkan pemilihan dan pengangkatan Direksi serta jabatannya, selanjutnya dapat ditentukan lain berdasarkan keputusan dalam Rapat umum Pemegang Saham.</p> <p>3. <u>Perta Samtan Gas</u></p> <p>i. Pasal 10 Ayat 2 huruf b (ii) “Pada saat dimulainya produksi komersial oleh Perseroan, hak untuk mencalonkan Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur akan berlaku bergantian diantara pemegang saham, dimana pemegang saham Indonesia mempunyai hak untuk mencalonkan President Director pertama pascaproduksi komersial dan penggantinya, jika ada...”</p> <p>ii. Pasal 13 Ayat 1 huruf b (ii) “Setelah mulainya produksi komersial Perseroan, hak untuk mencalonkan Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris akan berlaku bergantian diantara pemegang saham, dengan pemegang saham asing mempunyai hak untuk mencalonkan Presiden Komisaris pertama setelah produksi komersial dimulai dan penggantinya, jika ada...”</p> <p>4. <u>Perkasa</u> : tidak diatur secara khusus dalam Anggaran Dasar</p> <p>5. <u>JUP</u>: Kerja sama antara Gagas - JUP merupakan perjanjian <i>joint operation</i> sehingga tidak mempunyai organ perseroan seperti Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS.</p> <p>c. Pencatatan untuk Transgasindo, Perkasa, PDG dan PSG tidak memenuhi kriteria pengendalian sesuai PSAK 110 (d.h PSAK 65) sehingga laporan keuangan tidak dikonsolidasi namun mengacu pada PSAK 111 Pengaturan Bersama (d.h PSAK 66) dengan menggunakan equity method.</p> <p>i. Indikator-indikator yang menunjukkan bahwa Perseroan tidak memiliki pengendalian pada Transgasindo, Perkasa, PDG, PSG dan JUP: Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bentuk pengendalian yang telah ditentukan oleh Perseroan adalah pengendalian bersama, dimana persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktifitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.</p>

Paraf:.....


Lampiran I Penjelasan Perseroan
Permintaan Penjelasan Lanjutan atas Laporan Keuangan Tahunan Auditan
per 31 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
	<p>ii. Bagaimana KAP melakukan review atau audit atas ketepatan kebijakan Perseroan untuk tidak mengkonsolidasi entitas-entitas tersebut? Agar dapat dijelaskan (jawaban atas pertanyaan ini agar dapat dikoordinasikan dengan pihak KAP).</p>	<p>Transgasindo, Perkasa, PSG, PDG dan JUP merupakan Ventura Bersama yang dibentuk Perseroan dengan counterpart untuk tujuan tertentu yang tertuang dalam pengaturan kontraktual. Berdasarkan penjelasan sebagaimana angka 3a dan 3b diatas, Transgasindo, Perkasa, PSG, PDG dan JUP masing-masing memenuhi indikator tidak terdapat pengendalian sehingga penyajian dalam Laporan Keuangan sebagai Ventura Bersama menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 111: Pengaturan Bersama (d.h PSAK 66).</p> <p>ii. Review atau audit yang dilakukan KAP atas ketepatan kebijakan Perseroan. Prosedur review atau audit yang dilakukan atas ketepatan kebijakan Grup PGN untuk tidak mengkonsolidasi entitas-entitas tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan reuiu atas Anggaran Dasar atau dokumen lain yang terkait pengaturan Entitas, apakah memenuhi syarat-syarat pengendalian sesuai dengan PSAK 110: Laporan Keuangan Konsolidasian (d.h PSAK 65) atau tidak. 2. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat pengendalian dalam PSAK 110: Laporan Keuangan Konsolidasian (d.h PSAK 65), dilanjutkan reuiu atas Anggaran Dasar atau dokumen lain yang terkait pengaturan Entitas, apakah memenuhi indikator-indikator sebagai pengendalian bersama sebagaimana yang disyaratkan dalam PSAK 111: Pengaturan Bersama (d.h PSAK 66). <p>Secara umum, berdasarkan prosedur review atau audit yang telah dilakukan, KAP menyimpulkan bahwa keputusan mengenai aktivitas relevan, yang pada praktiknya diputuskan di dalam RUPS, mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat (<i>unanimous consent</i>) dari para pihak yang mengendalikan secara kolektif, dalam hal ini adalah PGN dan pemegang saham lainnya. Adanya klausul tersebut juga menyebabkan Grup PGN tidak memiliki <i>super majority approval</i> atas investee. Beberapa contoh klausul terkait kuorum dan pengambilan suara di dalam RUPS yang menunjukkan pengendalian bersama adalah sebagai berikut:</p> <p><u>Transgasindo</u> Per 31 Desember 2023, komposisi pemegang saham Transgasindo adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PGN sebesar 59,87%, • Transasia sebesar 40%, • Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Umum Gas Negara (YKPP) sebesar 0,13%

Paraf: 

Lampiran I Penjelasan Perseroan
Permintaan Penjelasan Lanjutan atas Laporan Keuangan Tahunan Auditan
per 31 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>Sesuai dengan Anggaran Dasar Transgasindo, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kuorum RUPS sah apabila RUPS dihadiri oleh perwakilan PGN dan Transasia.• Pengambilan keputusan dalam RUPS adalah sah apabila suara setuju minimal 2/3 dari jumlah suara. <p>Dalam hal ini, persetujuan atas aktivitas relevan di dalam RUPS disetujui secara bersama-sama oleh PGN dan Transasia.</p> <p><u>Perkasa</u></p> <p>Per 31 Desember 2023, komposisi pemegang saham Perkasa adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">• PGN Mas (anak perusahaan PGN) sebesar 60%• Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Umum Gas Negara (YKPP) sebesar 40% <p>Sesuai dengan Anggaran Dasar Perkasa, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kuorum RUPS sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau yang mewakili.• Pengambilan keputusan dalam RUPS adalah sah apabila disetujui oleh seluruh pemegang saham atau yang mewakili. <p>Dalam hal ini, persetujuan atas aktivitas relevan di dalam RUPS disetujui secara bersama-sama oleh PGN Mas dan YKPP.</p>

Paraf: 

Lampiran I Penjelasan Perseroan
Permintaan Penjelasan Lanjutan atas Laporan Keuangan Tahunan Auditan
per 31 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban																																																																														
4	<p>Berdasarkan tanggapan Perseroan nomor 12, Perseroan menjelaskan perihal fasilitas pinjaman Club Deal yang diperoleh Perseroan dari 4 (empat) perbankan dengan total plafon pinjaman sebesar USD 800 juta. Agar dapat dijelaskan lebih lanjut oleh Perseroan:</p> <p>a. Berdasarkan saldo terhutang per 31 Desember 2023, agar Perseroan dapat mencantumkan jumlah jatuh tempo pinjaman bank Club Deal bersama dengan pinjaman bank JBIC dan IBRD Perseroan berdasarkan tahun jatuh tempo dengan melengkapi tabel berikut ini:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>Bank</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Club deal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JBIC</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IBRD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grand total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">USD 505.459.923</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Sehubungan dengan pinjaman Club Deal, agar Perseroan dapat melengkapi tabel pemenuhan financial covenant sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>Loan covenant</th> <th>Rasio persyaratan</th> <th>Rasio Perseroan</th> <th>Memenuhi (Ya/Tidak)</th> <th>Status waiver (jika tidak memenuhi)</th> <th>Keterangan lain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bank	2024	2025	2026	2027	2028	Club deal						JBIC						IBRD						Total						Grand total					USD 505.459.923	Loan covenant	Rasio persyaratan	Rasio Perseroan	Memenuhi (Ya/Tidak)	Status waiver (jika tidak memenuhi)	Keterangan lain																			<p>a. Penjelasan Perseroan untuk pertanyaan Nomor 4 poin a merupakan informasi yang tidak dipublikasikan, sehingga Perseroan akan menyampaikan tanggapan kepada Bursa melalui SPE-IDXnet form E074 Korespondensi oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa (non publish).</p> <p>b. Berikut disampaikan financial covenant pinjaman club deal Per 31 Desember 2023:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>Loan Covenant</th> <th>Rasio Persyaratan</th> <th>Rasio Perseroan</th> <th>Memenuhi (Ya/Tidak)</th> <th>Status Waiver (Jika Tidak Memenuhi)</th> <th>Keterangan Lain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gross Debt to Equity</td> <td>> 2,3 kali</td> <td>0,44 Kali</td> <td style="text-align: center;">Ya</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Tidak ada cedera janji</td> </tr> <tr> <td>DSCR</td> <td>Minimal 1,3 kali</td> <td>6,04 Kali</td> <td style="text-align: center;">Ya</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Tidak ada cedera janji</td> </tr> </tbody> </table>	Loan Covenant	Rasio Persyaratan	Rasio Perseroan	Memenuhi (Ya/Tidak)	Status Waiver (Jika Tidak Memenuhi)	Keterangan Lain	Gross Debt to Equity	> 2,3 kali	0,44 Kali	Ya	-	Tidak ada cedera janji	DSCR	Minimal 1,3 kali	6,04 Kali	Ya	-	Tidak ada cedera janji
Bank	2024	2025	2026	2027	2028																																																																											
Club deal																																																																																
JBIC																																																																																
IBRD																																																																																
Total																																																																																
Grand total					USD 505.459.923																																																																											
Loan covenant	Rasio persyaratan	Rasio Perseroan	Memenuhi (Ya/Tidak)	Status waiver (jika tidak memenuhi)	Keterangan lain																																																																											
Loan Covenant	Rasio Persyaratan	Rasio Perseroan	Memenuhi (Ya/Tidak)	Status Waiver (Jika Tidak Memenuhi)	Keterangan Lain																																																																											
Gross Debt to Equity	> 2,3 kali	0,44 Kali	Ya	-	Tidak ada cedera janji																																																																											
DSCR	Minimal 1,3 kali	6,04 Kali	Ya	-	Tidak ada cedera janji																																																																											

Paraf:

Lampiran I Penjelasan Perseroan
Permintaan Penjelasan Lanjutan atas Laporan Keuangan Tahunan Auditan
per 31 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban																								
5	<p>Berdasarkan tanggapan Perseroan nomor 13 terkait dengan Perpajakan, Perseroan menjelaskan perihal status dari taksiran tagihan pajak sebesar USD 31,9 juta berdasarkan entitas anak dan status terakhir dari restitusi pajak tersebut. Agar dapat dijelaskan lebih lanjut:</p> <p>a. Ringkasan status terakhir taksiran tagihan pajak grup Perseroan dengan melengkapi tabel berikut</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Entitas</th> <th style="width: 15%;">Jumlah taksiran tagihan pajak</th> <th style="width: 10%;">Tahun pajak</th> <th style="width: 15%;">Status Taksiran Tagihan Pajak</th> <th style="width: 15%;">Jumlah yang diklaim</th> <th style="width: 15%;">Jumlah yang sudah direstitusi (<i>actual</i>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Perseroan menyampaikan bahwa “Proses pengembalian Fasken masih berproses namun belum diterima oleh Fasken sampai sekarang”. Agar Perseroan dapat menjelaskan latar belakang Fasken belum menerima pengembalian pajak badan tersebut dan upaya Perseroan untuk dapat memperoleh realisasi pengembalian pajak tersebut</p>	Entitas	Jumlah taksiran tagihan pajak	Tahun pajak	Status Taksiran Tagihan Pajak	Jumlah yang diklaim	Jumlah yang sudah direstitusi (<i>actual</i>)																			<p>a. Penjelasan Perseroan untuk pertanyaan Nomor 5 poin a merupakan informasi yang tidak dipublikasikan, sehingga Perseroan akan menyampaikan tanggapan kepada Bursa melalui SPE-IDXnet form E074 Korespondensi oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa (<i>non publish</i>).</p> <p>b. Sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 (tanggal laporan auditor independen), Fasken masih belum memperoleh pengembalian dari IRS. Fasken telah mengajukan pengembalian dan sedang menunggu pengembalian dari IRS.</p>
Entitas	Jumlah taksiran tagihan pajak	Tahun pajak	Status Taksiran Tagihan Pajak	Jumlah yang diklaim	Jumlah yang sudah direstitusi (<i>actual</i>)																					
6	<p>Berdasarkan tanggapan Perseroan nomor 17 terkait dengan perjanjian-perjanjian penting, Perseroan menjabarkan status pelaksanaan kontrak PJB LNG Perseroan. Agar dapat dijelaskan lebih lanjut oleh Perseroan:</p> <p>a. Kontrak dengan Gunvor dalam kondisi Force Majeur sementara kontrak Perseroan dengan China National Technical IMP & EXP Corp berstatus aktif. Adapun Perseroan berstatus sebagai penjual LNG untuk kedua perusahaan tersebut. Agar dapat dijelaskan alasan dan latar belakang atas perbedaan kedua kondisi tersebut.</p>	<p>a. Terkait kontrak Perseroan dengan China National Technical IMP & EXP Corp. berstatus aktif karena kontrak pasokan LNG-nya tidak berasal dari LNG Portfolio Pertamina sehingga tidak terdampak kondisi Force Majeure akibat tidak terlaksananya pengalihan LNG Portfolio Pertamina.</p> <p>b. Perseroan telah melakukan beberapa diskusi dengan Gunvor dan menjelaskan latar belakang yang</p>																								

Paraf:

Lampiran I Penjelasan Perseroan
Permintaan Penjelasan Lanjutan atas Laporan Keuangan Tahunan Auditan
per 31 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
	b. Status terakhir upaya Perseroan untuk memperoleh kesepakatan force majeure dengan Gunvor	menyebabkan Perseroan mendeklarasikan Force Majeure dan sampai dengan saat ini Perseroan dan Gunvor masih melakukan korespondensi terkait hal ini.

Paraf: 